

# IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Naila Citra  
NPP. 30.1035

*Asdaf Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: nailacitra0208@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Jatnika Dwi Asri, SE., M. Si., M. Ak.

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on problems related to the implementation of The Regional Government Information System (SIPD) in Hulu Sungai Utara District which will only be implemented in 2022. **Purpose:** This study aims to find out how SIPD is implemented, to find out the inhibiting factors for SIPD implementation, and to find out the efforts to prevent these obstacles. **Method:** This study uses descriptive qualitative method with an inductive approach with the perspective of implementation according to Edward III's theory. Data collection techniques consist of interviews, observation, and documentation. In collecting data, the authors conducted in-depth interviews with 6 informants. **Result:** The findings are SIPD is still being carried out on a trial basis and in stages in assisting the input of regional financial data, which then outputs from SIPD financial reports as a form of accountability for regional financial management. **Conclusion:** the implementation of SIPD in regional financial management, especially in the field of administration at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Hulu Sungai Utara Regency is not optimal. The obstacles found include the lack of quality and quantity of human resources, the absence of the SIPD Standard Operating Procedure (SOP) from BPKAD, the SIPD menu has not been maximized, and delays in repairs from the center. The need for efforts from the local government can conduct SIPD training for employees and add employees at BPKAD, use central SOPs related to SIPD, use companion applications, and coordinate directly with the center.

**Keywords:** System Implementation; Financial Accountability; Financial Management.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan terkait penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang baru dijalankan pada tahun 2022. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi SIPD, mengetahui faktor penghambat implementasi SIPD, dan mengetahui upaya untuk mencegah hambatan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dengan perspektif teori implementasi menurut Edward III.

Teknik pengumpulan data terdiri atas wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu SIPD masih dijalankan secara uji coba dan bertahap dalam membantu penginputan data keuangan daerah yang kemudian *output* dari SIPD ialah laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. **Kesimpulan:** Implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara belum optimal. Hambatan yang ditemukan diantaranya kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, belum adanya SOP terkait SIPD dari BPKAD, menu SIPD belum maksimal, dan keterlambatan perbaikan dari pusat. Perlunya upaya dari pemerintah daerah bisa melakukan pelatihan SIPD bagi pegawai dan menambah pegawai di BPKAD, menggunakan SOP pusat terkait SIPD, menggunakan aplikasi pendamping, dan melakukan koordinasi langsung dengan pusat.

**Kata kunci:** Implementasi Sistem; Akuntabilitas Keuangan; Pengelolaan Keuangan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas menjadi asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggara daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Salah satu bentuk terwujudnya *good governances* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ialah pengelolaan keuangan dengan menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Besarnya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah ditentukan oleh penyajian laporan keuangan yang lengkap dan transparan serta ketersediaan dan aksesibilitasnya kepada pengguna informasi (Ludani dkk, 2015: 3).

Pemanfaatan teknologi dalam rangka mewujudkan informasi yang akurat, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, serta menerapkan *good governances* dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Hal ini membuat seluruh SKPD yang ada di Indonesia diwajibkan menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem informasi yang memuat informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, serta informasi pemerintah daerah lainnya. SIPD merupakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dapat menyediakan database secara elektronik dan program satu data pemerintah dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri guna sebagai alat bantu pemerintah daerah.

Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang baru mulai menjalankan SIPD pada tahun 2022. Penerapan SIPD sebagai salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan Opini BPK dalam penyajian pengelolaan keuangan di seluruh instansi terkait. Fungsi BPK sebagai lembaga pengawasan yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan eksternal atas pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Opini BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017-2021 ialah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam 5 (lima) tahun berturut-turut (BPK RI, 2021). Berkaitan dengan hal tersebut, penyajian pengelolaan keuangan di



Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah terselenggara dengan baik. Namun, untuk meningkatkan dan mempertahankan opini WTP tersebut dan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya, pemerintah harus menerapkan SIPD sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun, penerapan ini belum berjalan maksimal karena masih adanya kendala dalam pengoperasiannya.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi SIPD dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. SIPD belum berjalan maksimal terutama dalam bidang penatausahaan. Hal tersebut karena adanya adaptasi kembali penggunaan aplikasi dari sebelumnya menggunakan SIMDA yang lebih mudah penggunaannya kemudian digantikan dengan SIPD yang baru dijalankan pada tahun 2022, di mana sistem didalamnya lebih detail dan rinci sehingga dalam penggunaannya masih awam dan diperlukan sosialisasi khusus untuk penggunaan SIPD yang mengakibatkan terhambatnya proses penyusunan anggaran kas dan penatausahaan keuangan, baik dalam proses pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Pembayaran (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Kendala berdampak juga pada tertundanya pencairan gaji untuk pegawai SKPD yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kendala lainnya terdapat pada masalah sumber daya manusia yang mampu mengoperasikannya masih terbatas, dari jumlah keseluruhan pegawai BPKAD sebanyak 38 orang hanya 21 orang yang paham dan mampu mengoperasikan SIPD, sedangkan komputer/laptop yang disediakan untuk pengoperasiannya ada 32 unit. Kemudian, untuk jaringan internet yang tersedia di BPKAD sudah cukup dengan tiap-tiap bidangnya berlangganan internet ditambah 2 (dua) jaringan internet sebesar 100 Mbps, sehingga untuk membuka aplikasi yang lain berbasis web masih berjalan dengan lancar.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi SIPD. Penelitian Nasution dan Nurwani berjudul Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan (Nasution dan Nurwani, 2021), menemukan bahwa program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) telah dimanfaatkan oleh BPKAD Kota Medan sebagai bentuk pengimplementasian kebijakan yang diberikan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat beberapa kendala dalam sistem informasi pemerintah daerah ini, yang menyebabkan banyak pekerjaan dan proses input lainnya tertunda. Penelitian Ekaputra berjudul Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk (Ekaputra, 2021) menemukan bahwa Pada tahun pertama setelah diperkenalkan SIPD, aplikasi ini masih kurang bermanfaat. Hal tersebut karena, kurangnya pemahaman terhadap aplikasi dan perubahan nomenklatur program kegiatan yang membingungkan pemerintah daerah saat membuat dokumentasi RKPD menjadi kendala utama dalam pemanfaatan yang efektif. Penelitian Vitriana dkk berjudul Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru (Vitriana dkk., 2022) berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan SIPD BPKAD Kota Pekanbaru kurang efektif dan SIPD yang digunakan untuk mendukung informasi pengelolaan keuangan daerah kurang efektif. Hanya saja, keunggulan SIPD adalah terintegrasi ke seluruh OPD di Indonesia dan memiliki cakupan area yang lebih luas.

Penelitian Annisa berjudul Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi (Annisa, 2021) menemukan bahwa dalam penerapan SIPD sudah sesuai dengan ketentuan, namun masih terdapat kendala yaitu, pengguna kurang teliti dalam menginput data, jaringan internet yang belum stabil dan sistem yang terkadang eror. Adapun solusi yang dilakukan antara lain dengan mempersiapkan semua data dengan baik, meng-update aplikasi ke versi terbaru, dan meningkatkan kapasitas internet. Penelitian Kusumawardani berjudul Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan (Kusumawardani, 2020) menemukan bahwa setiap bendahara memberikan pertanggungjawabannya berupa laporan keuangan daerah yang dilakukan secara periodik. Pertanggungjawaban secara administrative dibuat oleh bendahara pengeluaran kemudian disampaikan kepada PA/KPA.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, di mana dalam penelitian ini fokus dan lokus penelitiannya pada implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan penelitian terdahulu fokus pada analisis SIPD secara keseluruhan dengan lokus penelitian kota/kabupaten yang berbeda. Penulis menggunakan dimensi-dimensi yang berasal dari teori George C. Edward III (dalam Leo Agustino 2016:136-141) yang menyatakan bahwa implementasi ada empat dimensi, yaitu komunikasi sumber daya, disposisi/kecenderungan, dan struktur birokrasi.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan beserta faktor penghambat, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif (Hardani, 2020: 18). Metode ini digunakan untuk memusatkan perhatian terhadap masalah yang ada serta menggambarkan fakta tentang masalah yang dicari, penulis akan berusaha meneliti secara keseluruhan permasalahan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya pada implementasi SIPD dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang ada kemudian dikumpulkan dari berbagai sumber untuk dianalisis dan dapat ditarik sebuah kesimpulan. Adapun pendekatan induktif dilakukan dengan mengumpulkan data atau fakta nyata dari sebuah pengalaman dengan mempelajari dan mengamati masalah-masalah yang terjadi kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara tepat, sehingga menghasilkan gambaran atau tulisan mengenai permasalahan tersebut. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara dengan teknik purposive sampling (Sugiyono, 2016: 218) terhadap 6 orang informan yang terdiri dari kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kepala sub bagian keuangan dan aset, kepala bidang perbendaharaan, kepala sub bidang pengelola kas, kepala sub bidang pelaporan, dan staf bidang perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun analisisnya menggunakan analisis kualitatif Model Miles dan Huberman (dalam Hardani,



2020: 163) yang terdiri dari beberapa aktivitas yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan teori implementasi Edward III (dalam Leo Agustino 2016:136-141), terdiri dari beberapa faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Pemerintah melakukan inovasi berupa pembuatan aplikasi SIPD dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang terprogram dipusat dalam satu data. Melalui SIPD juga, sistem pengelolaan keuangan terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. *Output* dari SIPD ialah laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dapat dihasilkan jika SIPD dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi Edward III (dalam Leo Agustino 2016:136-141). Menurut teori tersebut, ada 4 (empat) faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

##### **3.1.1 Komunikasi**

Komunikasi yang efektif sangat penting dalam sebuah SKPD, baik antara pimpinan dengan bawahan maupun antar rekan kerja. Hal tersebut karena, komunikasi yang tidak lancar dapat menghambat pelaksanaan kebijakan bersama, yang akan berdampak buruk pada pengelolaan informasi keuangan menggunakan aplikasi SIPD. Terdapat 3 (tiga) indikator yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Pada dimensi komunikasi sudah berjalan baik, terkait dengan transmisi/penyebaran informasi terkait pelaksanaan SIPD pada BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berjalan dengan lancar karena pegawai merespon secara positif informasi atau arahan yang diberikan. Terkait kejelasan informasi mengenai implementasi SIPD yang disampaikan dapat diterima dengan baik namun pimpinan dalam mengambil kebijakan atau arahnya masih belum konsisten, sehingga implementasi SIPD terutama di bidang penatausahaan masih belum berjalan maksimal karena kebijakan atau arahan yang diberikan berubah-ubah.

##### **3.1.2 Sumber Daya**

Aspek-aspek sumber daya harus dikelola dengan baik agar implementasi SIPD dapat berjalan maksimal. Terdapat 4 (empat) indikator yaitu staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Terkait staf, meskipun implementasi SIPD memiliki pegawai yang mumpuni, namun tidak semuanya mampu memahami dan menggunakan aplikasi tersebut karena masih terbilang baru di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sebelumnya menggunakan SIMDA dimana pengoperasian dan tampilan menunya tidak sekompleks SIPD. Informasi yang diterima pegawai dapat diterima dengan baik hal ini dapat dilihat dari pegawai yang mampu mengoperasikan SIPD sesuai dengan fungsi dan tupoksinya. Terkait dengan wewenang, pegawai telah menjalankan tugas sesuai dengan arahan pimpinan dan bekerja sesuai bidangnya masing-masing dalam pengoperasian SIPD, yang didukung dengan fasilitas yang memadai yaitu komputer/laptop, *software* (SIPD) yang sudah terhubung dengan pusat, dan jaringan internetnya.

### **3.1.3 Disposisi**

Kebijakan akan terlaksana sesuai rencana apabila para pelaksana memiliki sikap dan kecenderungan yang mendukung. Terdapat 2 (dua) indikator yaitu pengangkatan birokrat dan pemberian insentif. Terkait pengangkatan birokrat, di BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk pegawai mutasi hanya orang-orang terpilih dan berkualitas dalam bidang IT dan keuangan, sehingga penyesuaiannya tidak terlalu sulit dalam pengoperasian SIPD dan sebagai bentuk meningkatkan semangat kerja diberikan pemberian insentif kepada pegawai dalam bentuk gaji.

### **3.1.4 Struktur Birokrasi**

Terdapat 2 (dua) indikator yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Terkait SOP pengoperasian SIPD khusus BPKAD masih dalam proses pembuatan dan penyesuaian dengan berjalannya aplikasi ini, meskipun demikian koordinasi dan kerjasama antara kepala badan dan bidang-bidang di bawahnya tetap berjalan baik dan pengoperasian SIPD dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

## **3.2 Faktor Penghambat Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara**

### **3.2.1 Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Penerapan SIPD masih perlu diperhatikan terkhusus kepada seluruh pegawai yang mengelola aplikasi karena belum terlalu memahami sistemnya yang berbeda dengan SIMDA, untuk itu perlu dilakukan pemahaman lebih lanjut demi peningkatan sumber daya manusia di BPKAD, karena pekerjaan yang ada didalamnya berkaitan dengan keuangan tidak semua orang mudah dan paham mengenai keuangan. Selain itu, dari segi kuantitas, BPKAD kekurangan sumber daya manusia yang memadai karena masih ada yang *double job* dalam melakukan pekerjaannya.

### **3.2.2 Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait SIPD**

SOP terkait SIPD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara masih dalam tahap pembuatan, sehingga panduan atau tutorial terkait SIPD di BPKAD belum ada, hal tersebut membuat pegawai hanya berpatokan dengan prosedur pusat yang terbatas dan berpengaruh dalam penerapan SIPD yang berjalan tidak maksimal.

### **3.2.3 Menu SIPD Belum Maksimal**

Menu yang tersedia dalam SIPD lebih banyak dan kompleks daripada SIMDA namun tidak semua dapat diakses karena hanya tampilannya saja tapi tidak berfungsi, contohnya buku pajak dan laporan TU bahkan tidak ada menu untuk mencatat transaksi pengembalian belanja serta beberapa transaksi belum dapat diinput (transaksi BLUD, JKN dan transaksi lain yang tidak dilakukan melalui kas daerah) sehingga membuat terhambatnya laporan keuangan yang di kelola oleh bidang penatausahaan dalam merekon data keuangan setiap bulannya. Karena menu yang ditampilkan tidak berfungsi dengan maksimal dan transaksi tidak dapat diinput.

### **3.2.4 Keterlambatan Perbaikan dari Pusat**

*Device* SIPD berada di pusat sehingga jika terjadi kesalahan dalam penginputan, tidak dapat dihapus atau diulang karena sistemnya langsung terinput. Untuk itu, harus melakukan pengajuan perbaikan



ke pusat, karena sistem semuanya diawasi dan di kontrol oleh pusat. Pemerintah daerah hanya bisa melakukan koordinasi via *whatsapp* dan respon pusat dalam menanggapi kesalahan penginputan ini terbilang lama paling cepat sekitar 3 bulan karena seluruh Indonesia yang ditanganinya.

### **3.3 Upaya Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara**

#### **3.3.1 Melakukan Pelatihan Pengoperasian SIPD bagi Pegawai dan Menambah Pegawai di BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Pelatihan terkait penggunaan SIPD akan terus dilakukan, baik secara formal atau nonformal. Secara formal, pelatihan akan dilakukan pada seluruh pegawai dengan mendatangkan langsung pegawai dari pusat dalam menjelaskan penggunaan aplikasi SIPD dan untuk pelatihan secara nonformal bisa dilakukan dengan mempelajarinya sendiri melalui internet atau yang sudah paham dan lihai bisa saling mengajari satu sama lain jika dalam sehari-hari tidak mengerti atau lupa cara dalam penggunaan aplikasi serta untuk SKPD lain bisa mengikuti pelatihan yang di adakan oleh BPKAD baik secara formal atau nonformal. Terkait penambahan pegawai yang mengelola SIPD akan dilakukan dengan cara dites kemampuan akuntansi dan juga kemampuan teknologi informasinya.

#### **3.3.2 Menggunakan SOP Pusat terkait Penggunaan SIPD**

SOP terkait SIPD untuk sementara masih menggunakan panduan dari pusat yaitu Permendagri Nomor 70 tahun 2019 yang mewajibkan pengoperasian pengelolaan keuangan daerah menggunakan SIPD. Hal tersebut dilakukan agar penerapan SIPD tetap berjalan sesuai arahan pemerintah.

#### **3.3.3 Menggunakan Aplikasi Pendamping yang Dibuat Pemerintah Daerah**

Aplikasi SIMDA FMIS merupakan aplikasi pendamping yang dibuat oleh pemerintah daerah yang dikelola oleh BPKP dalam membantu proses pengelolaan keuangan daerah. BPKAD memilih SIMDA FMIS sebagai aplikasi yang menggandeng SIPD agar pengelolaan keuangan dapat berjalan sebagai *back up-an* data ketika SIPD tidak dapat berjalan dengan baik.

#### **3.3.4 Melakukan Koordinasi Langsung dengan Pusat**

Perbaikan data yang diterima pusat via telpon atau pesan sangatlah banyak sehingga koordinasinya tidak dapat diterima langsung terutama keluhan dan perbaikan yang diterima dari seluruh Indonesia. sedangkan koordinasi langsung dengan mendatangi kemendagri sangatlah efektif namun perlunya biaya dan waktu yang lama dalam menindaklanjuti kesalahan perbaikan data.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan aplikasi terintegrasi satu yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri guna sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Penulis menemukan temuan penting yaitu SIPD masih dijalankan secara uji coba dan bertahap dalam membantu penginputan data keuangan daerah yang kemudian output dari SIPD ialah laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Sama halnya dengan temuan Nasution dan Nurwani, bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam SIPD yang menyebabkan banyak pekerjaan dan proses input tertunda (Nasution dan Nurwani,

2021). Temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya karena menjelaskan penyebab penginputan data keuangan tertunda akibat menu SIPD yang belum berfungsi dengan maksimal.

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi SIPD dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum optimal. Adapun Faktor penghambatnya antara lain kurangnya kualitas dan kuantitas SDM, belum adanya SOP dari BPKAD terkait SIPD, menu SIPD belum maksimal, dan keterlambatan perbaikan dari pusat. Upaya yang dilakukan antara lain melakukan pelatihan bagi pegawai mengenai pengoperasian SIPD dan menambah pegawai, menggunakan SOP Pusat terkait penggunaan SIPD, menggunakan aplikasi pendamping yang dibuat oleh pemerintah daerah, dan melakukan koordinasi langsung dengan pusat.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu SKPD sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori Edward III.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi SIPD dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Hulu Sungai Utara dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Annisa. 2021. *Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi*. Universitas Andalas.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2021. *Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Hulu Sungai Utara.
- Ekaputra, N. D. 2021. *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan Dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk*. Jurnal Otonomi. Vol. 21, 62-79.
- Hardani, Ahyar. dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Kusumawardani, Vivi Pancasari. 2020. *Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan*. Jurnal Pendidikan Ekonomi. Vol. 5 (2).



Ludani, M. M., Tampi, G. B., dan Pombengi, J. 2015. *Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan)*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 2 (029).

Nasution, Muhammad Irfan dan Nurwani. 2021. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 9 (77), 109-116.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: PT Alfabeta.

Vitriana, Nidya. dkk. 2022. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru*. Digital Business Journal (DIGIBIS). Vol. 1 No.1, 62-77.

